BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan anak sangat erat hubungannya dengan masalah perkawinan. Perikatan dalam perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, hidup bersama suami istri kemudian melahirkan anak keturunan mereka yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Keluarga merupakan kelompok sosial, yang terdapat di semua lapisan dan masyarakat. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan negara, keluarga terbentuk melalui perkawinan.

Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidup. Perkawinan salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan, tidak hanya manusia, bahkan hal ini berlaku pada hewan dan tumbuhan.¹ Perkawinan yang dikehendaki dalam hukum Islam dapat dilihat di Q.S. Ar-Ruum/21: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

¹Al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6, terj. Muhammad Thalib Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'aarif, 1980), hlm. 7.

²*Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 406.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³.

Perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi rukun dan syarat nikah. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Apabila tidak terpenuhinya rukun nikah pada saat akad nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.⁵ Pernikahan yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat rukun nikah, maka pernikahan itu menjadi rusak (fasid), pernikahan fasid hukumnya adalah tidak sah.⁶

Pokok masalah dalam perkara penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Bangli Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl, yang mana penetapan asal usul anak dianggap sah di mata hukum, namun penetapan anak tersebut diperoleh dari hasil isbat nikah yang ditolak, karena terbukti pernikahan para pemohon fasid.

³*Ibid.*, hlm. 406.

⁴Saleh K. Wantjik, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta: P.T ictiar baru, 1974), hlm. 87.

⁵*Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, hlm.5.

⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 109.

Pernikahan para pemohon dilakukan di luar kantor urusan agama kemudian melangsungkan pernikahan dengan wali nikah (*wali muhakkam*) dan seharusnya yang menjadi wali nikah pemohon II adalah wali hakim karena bapak pemohon II beragama Kristen dan salah satu syarat wali nikah ialah beragama Islam. Sehingga isbat nikah para pemohon ini ditolak karena terbukti pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak sah menurut agama maupun adat.

Namun hal ini tidak berlaku ketika ada hakim yang menetapkan keabsahan anak dari isbat nikah yang ditolak tersebut, sebagaimana yang termasuk dalam salah satu pertimbangannya bahwa sekalipun perkawinan para pemohon tidak terbukti sah menurut hukum (pernikahan fasid), namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (pernikahan fasid) tersebut tidak dinisbatkan kepada pemohon I dan pemohon II. Sebagaimana salah satu pertimbangan dalam penetapan hakim Pengadilan Agama Bangli adalah sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لا ثبات النسب , و طريق لثبوته في الواقع ,
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا , او كان زواجا عرفيا , اي منعقدا بطريق عقد خا
ص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية , ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من
اولاد .

“pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa di daftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menurut penulis penetapan asal usul anak dari isbat nikah yang ditolak adalah suatu kejanggalan adanya kecacatan hukum yang sebelumnya yaitu tentang pengingkaran terhadap perkawinan, yang dilakukan sebelumnya yang mana perkawinan di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang Perkawinan, itulah perkawinan yang sesungguhnya serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁷ Bagaimana bisa perkawinan yang dianggap tidak sah dimata hukum namun anak dari hasil perkawinan fasid tidak sah tersebut tetap diakui anak dari pemohon I dan pemohon II.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl yang penulis dapatkan di Deriktori Mahkamah Agung, baik dari segi hukum pernikahan fasid dan status anak yang diakui. Penulis ingin menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul, “Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl)”.

⁷Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 125.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak dari pernikahan yang fasid penetapan perkara Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl?
2. Bagaimana tujauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak dari isbat nikah pernikahan fasid yang ditolak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang penetapan asal usul anak dari pernikahan yang fasid dalam penetapan perkara Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl.
2. Untuk mengetahui tujauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak dari isbat nikah pernikahan fasid yang ditolak.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan asal usul anak di pengadilan agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara asal usul anak di pengadilan agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Asal usul diartikan sebagai asal keturunan, sebab mulanya; yang menjadi sebab-sebabnya (tentang suatu peristiwa atau kejadian).⁸ Anak adalah keturunan,⁹ semua anak yang lahir dari hubungan ayah dan ibunya adalah anak kandung, asal usul seorang anak terbagi menjadi dua yaitu anak kandung dari pernikahan yang sah dan anak kandung dari pernikahan yang tidak sah. Asal usul anak yang penulis maksud yaitu penetapan hubungan nasab antara anak dengan ayah dan ibunya yang terlahir dari perkawinan fasid.
2. Pernikahan fasid atau nikah fasid terdiri dari dua kata, yaitu nikah dan fasid. Nikah menurut istilah syara adalah akad kemudian pengertian fasid adalah rusak. Nikah fasid yang penulis maksud adalah nikah fasid yang tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat nikah, yang mana pernikahan dengan menggunakan wali nikah (wali *muhakkan*), hukum dari nikah fasid ini yaitu tidak sah.
3. Penetapan adalah permohonan untuk ditetapkan tentang sesuatu dengan tanpa adanya perkara dengan lawan, produk perkara hukum pengadilan

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 51.

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *KBBI* (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hlm. 57.

atas perkara permohonan yang bersifat (voluntair),¹⁰ Penetapan yang dimaksud disini adalah penetapan asal usul anak dari pernikahan yang fasid dengan Nomor perkara 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl.

F. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Tetapi setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan dua skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Pertama skripsi yang berjudul: penetapan asal usul anak yang lahir akibat pernikahan di bawah tangan (Nomor 0180/Pdt.P/2015/PA. BJM), yang ditulis oleh Norhabibah Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga 2012. Permasalahan yang diteliti membahas tentang ketentuan hukum perkawinan, keabsahan perkawinan, ketentuan tentang anak yang sah menurut hukum, kompetensi dan hukum acara peradilan agama dan penetapan asal usul anak. Pernikahan yang tidak tercatat di KUA setempat tetapi pernikahan para pemohon ini terbukti sah menurut hukum Islam dan kemudian mengajukan penetapan asal usul anak guna mendapat akta kelahiran anak mereka, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil temuan, majelis hakim mengabaikan pentingnya

¹⁰Yuzna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: t.p. 2015), hlm. 105.

pencatatan suatu peristiwa perkawinan Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).¹¹

Kedua skripsi yang berjudul: ambivalensi pengesahan anak sekaligus penolakan isbat nikah dalam satu penetapan hakim. Ditulis oleh Rusli Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga 2012. Skripsi ini membahas permasalahan seputar pernikahan dianggap fasid karena pernikahan poligami tanpa izin istri pertama maka mereka kemudian mengajukan pengesahan anak dari pernikahan yang kedua, metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil analisis penelitian hakim menolak isbat nikah dikarenakan masih menganggap terikat pertalian perkawinan lain (istri pertama). Begitu juga hal yang sangat ambivalensi adalah hakim menganggap anak dapat disahkan. Analisis dari tinjauan hukum Islam, dalam pertimbangan hukumnya hakim menganggap pernikahan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II disebut perkawinan fasid, karena ketika terjadi perkawinan tersebut pemohon I dengan pemohon II masih terikat perkawinan lain (istri pertama) padahal hal ini bertentangan dengan hukum Islam bahwa sepanjang rukun dan syarat terpenuhi maka tidak bisa dikatakan perkawinan fasid. Hasil temuan hakim keliru telah mengabaikan salah satu alat bukti, majelis hakim menganggap pernikahan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II disebut perkawinan fasid, karena ketika terjadi perkawinan tersebut pemohon I dengan pemohon II masih terikat perkawinan lain (istri pertama) padahal hal ini

¹¹Norhabibah, *Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Akibat Pernikahan Di Bawah Tangan* (Nomor 0180/Pdt.P/2015/PA.BJM), (Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2012).

bertentangan dengan hukum Islam bahwa sepanjang rukun dan syarat terpenuhi maka tidak bisa dikatakan perkawinan fasid.¹²

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis angkat ini adalah peneliti lebih menelaah pertimbangan hukum dan dalam penetapan asal usul anak yang diterima dari isbat nikah yang ditolak penetapan perkara Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl. Hakim menolak isbat nikah para pemohon dikarenakan pernikahan para pemohon fasid sebab kesalahan wali nikah (wali *muhakkam*). Akan tetapi hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dari pernikahan fasid tersebut sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II. Dalam penetapan ini hakim telah mengabaikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang Perkawinan yang sah dan tentang pentingnya pencatatan. Pencatatan perkawinan berguna untuk pembuktian asal usul anak, anak yang telah lahir dari pernikahan tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti autentik dalam pembuktian pernikahan maka menjadikan pernikahan tersebut pernikahan luar nikah dan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, selanjutnya menurut Pasal 43 ayat (1) dikatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

¹²Rusli, Ambivalensi Pengesahan anak Sekaligus Penolakan Isbat Nikah Dalam Satu Penetapan Hakim (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2012).

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan

Jenis penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹³

Sifat penelitian adalah preskriptif yaitu memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberi preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salahnya atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁴

Pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 184.

putusannya.¹⁵ Putusan yang penulis analisis adalah putusan Pengadilan Agama Bangli penetapan perkara Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl yang dianalisis penulis menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Bangli Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 42 dan Pasal 43.
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1), tentang Syarat wali nikah.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 187.

¹⁶Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm.141.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita internet.¹⁷ Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:

- 1) Wahbah, Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Darul Fikir*, Juz 9-10, 2006.
- 2) Erfani Aljan Abdullah, *Panduan Hukum Perdata Islam*, UII, 2017.
- 3) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- 4) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. 2010.
- 5) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Kencana Prenada Media Group. 2005.
- 6) Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. 2006.
- 7) Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*. Pt Raja Grafindo persada. 2014.
- 8) Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. Pt. Citra Aditya Bakti. 2003.

¹⁷Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 157.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder,¹⁸ seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹⁹ Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Ahmad Warson Munawir, kamus Al-Munawwir, Pustaka Progressif, cet IV, 1997.
- 2) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, 2008.
- 3) Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.3, Balai Pustaka, 1990.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum yang didapat di Direktori Mahkamah Agung yang berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Bangli Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang

¹⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 67.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.²⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

Preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberi preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salahnya atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²¹

b. Analisis bahan hukum

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 160.

²¹*Ibid.*, hlm. 184.

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori sebagai bahan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti yang terdiri dari: ketentuan hukum perkawinan, macam-macam wali, pencatatan perkawinan, tujuan perkawinan, pernikahan fasid, isbat nikah, asal usul anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab III Analisis Bahan Hukum yang terdiri dari penyajian duduk perkara, pertimbangan majelis hakim dan analisis yang meliputi analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bangli mengenai penetapan asal usul anak yang diterima dari isbat nikah yang ditolak dianalisis menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Bangli Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl.

Bab IV Penutup ini merupakan akhir bab yang berisi simpulan dan saran-saran.